

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
BANDUNG NOMOR 53/PID.B/2019/PN.BDG
DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 378 KUHP *JO*
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN
2005 TENTANG PERATURAN PELAKSANA
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TENTANG
BANGUNAN GEDUNG**

Oleh :
Muhammad Zaki Dermawan
NPM :
41151010160180

STUDI KASUS

**Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar sarjana hukum
pada program studi hukum**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2020**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Muhammad Zaki Dermawan
Nomor Pokok Mahasiswa : 41151010160180
Jenis Penulisan Tugas Akhir : Studi Kasus
Judul Penulisan Tugas Akhir : ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 53/PID.B/2019/PN.BDG DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 378 KUHP JO PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 2005 TENTANG PERATURAN PELAKSANA UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TENTANG BANGUNAN GEDUNG

Menyatakan bahwa Tugas Akhir ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa Tugas Akhir ini adalah plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, sehat walafiat, dan tanpa tekanan dari manapun juga.

Yang menyatakan,

Materai 6000

Muhammad Zaki Dermawan
NPM. 41151010160180

ABSTRAK

Pembinaan terhadap alat negara penegak hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan akan memberikan perlindungan kepada masyarakat, khususnya yang dirugikan karena tindakan yang melanggar hukum maupun kesalahan di dalam menerapkan hukum oleh para penegak hukum. Hukum sebagai sarana pencipta keadilan memerlukan pembinaan terhadap alat negara penegak hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan, dengan perkataan lain pembinaan terhadap Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan akan memberikan perlindungan kepada masyarakat, khususnya yang dirugikan karena tindakan yang melanggar hukum maupun kesalahan dalam menerapkan hukum oleh para penegak hukum. Kesalahan penerapan hukum oleh para penegak hukum mencerminkan kurang profesionalismenya para penegak hukum seperti dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 53/Pid.B/2019/PN.Bdg. Berdasarkan hal tersebut yang menarik untuk diteliti yaitu bagaimanakah Analisis Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 53/Pid.B/2019/PN.Bdg serta bagaimanakah Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 53/Pid.B/2019/PN.Bdg.

Pembahasan studi kasus ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk mencari asas-asas dan dasar-dasar falsafah hukum positif, serta menemukan hukum secara *in-concreto*. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu tidak hanya menggambarkan permasalahan saja, melainkan juga menganalisis melalui peraturan yang berlaku dalam hukum pidana. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder serta penelitian lapangan untuk mengumpulkan data primer.

Hasil penelitian menyimpulkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 53/Pid.B/2019/PN.Bdg merupakan penanganan hukum yang terkesan dipaksakan. PT Triputra Karya Agung dengan Ir. Adrianto Trisnadi Bin Harjoko sebagai Direktur Utamanya telah ada maksud menyalahgunakan kepercayaan pihak konsumen yang telah menyetorkan sejumlah uang untuk membeli apartemen/kondotel tipe Royal Tulip fasilitas bintang lima yang akan dibangun oleh PT Triputra Karya Agung, namun oleh jajaran direksi oleh PT Triputra Karya Agung pembangunan apartemen/kondotel tipe Premiere dengan fasilitas bintang hotel tiga dalam pembiayaan pembangunan sebagian menggunakan pembiayaan dari pembeli/konsumen apartemen/kondotel tipe Royal Tulip fasilitas bintang lima. Pertimbangan yuridis masih kurang tepat, terutama dalam menerapkan unsur-unsur dalam dakwaan pertama yakni Pasal 378 KUHP, karena unsur “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak” kurang tepat jika diterapkan kepada Ir. Adrianto Trisnadi Bin Harjoko, karena dari fakta-fakta hukum yang ada tidak terbukti Ir. Adrianto Trisnadi Bin Harjoko menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dari uang setoran para konsumen yang membeli apartemen/kondotel yang akan dibangun oleh PT Triputra Karya Agung. Faktanya adalah uang dari konsumen yang membeli apartemen/kondotel tersebut dipakai untuk membangun apartemen/kondotel lain.

ABSTRACT

Fostering the state apparatus of law enforcement, namely the Police, Attorney General's Office, and Courts will provide protection to the public, especially those who have been harmed due to actions that violate the law or mistakes in implementing the law by law enforcers. Law as a means of creating justice requires fostering the state apparatus of law enforcement, namely the Police, Attorney General's Office, and Courts, in other words, the guidance of the Police, Attorney General's Office, and Courts will provide protection to the public, especially those who have been harmed due to actions that violate the law or errors in implementing the law. by law enforcers. Errors in law enforcement by law enforcers reflect the lack of professionalism of law enforcers, as in the Bandung District Court Decision Number 53 / Pid.B / 2019 / PN.Bdg. Based on this, what is interesting to research is how the Bandung District Court Decision Analysis Number 53 / Pid.B / 2019 / PN.Bdg and how the Judges' Legal Considerations in the Bandung District Court Decision Number 53 / Pid.B / 2019 / PN.Bdg.

In the discussion of this case study the author uses a normative juridical research method that aims to find the principles and foundations of positive legal philosophy, and to find law in a concreto manner. The specification of this research is descriptive analytical, which does not only describe the problem, but also analyzes it through the applicable regulations in criminal law. Data collection techniques are carried out through library research to obtain secondary data and field research to collect primary data.

The results of the study concluded that the Bandung District Court Decision Number 53 / Pid.B / 2019 / PN.Bdg is a legal handling that seems forced. PT Triputra Karya Agung with Ir. Adrianto Trisnadi Bin Harjoko as the Main Director has the intention of abusing the trust of consumers who have deposited a certain amount of money to buy a Royal Tulip type apartment / condotel, a five-star facility to be built by PT Triputra Karya Agung, but by the board of directors by PT Triputra Karya Agung, the construction of the apartment Premiere type condotels with three star hotel facilities under construction financing partly using financing from buyers / consumers of apartments / condotel types of Royal Tulip with five star facilities. Juridical considerations are still inaccurate, especially in applying the elements in the first indictment, namely Article 378 of the Criminal Code, because the element "with the intention of benefiting oneself or others against the rights" is not appropriate if applied to Ir. Adrianto Trisnadi Bin Harjoko, because the existing legal facts are not proven by Ir. Adrianto Trisnadi Bin Harjoko benefits himself or others from deposits from consumers who buy apartments / condotels to be built by PT Triputra Karya Agung. The fact is that the money from consumers who buy the apartment / condotel is used to build another apartment / condotel.

KATA PENGANTAR

Berkat rahmat Allah SWT, serta atas petunjuk dan bimbingan-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana dengan membuat studi kasus yang berjudul :
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 53/PID.B/2019/PN.BDG DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 378 KUHP JO PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 2005 TENTANG PERATURAN PELAKSANA UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TENTANG BANGUNAN GEDUNG.

Pembuatan tugas akhir ini merupakan syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, selesainya tugas akhir ini berkat bantuan dan dorongan semua pihak berupa saran-saran dan bahan masukan serta data-data yang diperlukan sehingga memberikan kelancaran bagi penulis dalam menyelesaikannya. Sehubungan dengan hal tersebut penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Dr. Hj. Yeti Kurniati, S.H., M.H., selaku pembimbing, yang telah memberikan petunjuk dan arahan sehingga dapat terwujud tugas akhir ini, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana.
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan selaku Dosen Wali penulis pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H., selaku Wakil III Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Bapak Rachmat Sumarno, S.H., M.H., selaku Sekprodi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Bapak H. Riyanto S Akhmadi, S.H., M.H., selaku Ketua Laboratorium Hukum di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
9. Bapak dan Ibu Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
10. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada kedua orang tua penulis Bapak Nanang Sukmajaya, S.H., M.H., dan Ibu Tati Suryani S.H., serta istri penulis Dhea Putri Rahayu yang telah mencurahkan kasih sayang dorongan serta semangat kepada penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Semoga kebaikan, bantuan dan dorongan yang diberikan mendapat imbalan dan balasan dari Allah SWT. (amiin)

Bandung, Agustus 2020

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman :

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I : LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS DAN KASUS POSISI	
A. Latar Belakang Pemilihan Kasus.....	1
B. Kasus Posisi	8
BAB II : MASALAH HUKUM DAN TINJAUAN TEORITIK	
A. Masalah Hukum.....	14
B. Tinjauan Teoritik	
1. Tindak Pidana Penipuan	14
2. Tindak Pidana Penggelapan.....	20
3. Izin Mendirikan Bangunan	28
BAB III : RINGKASAN PUTUSAN DAN PERTIMBANGAN HUKUM	
A. Ringkasan Putusan.....	32
B. Pertimbangan Hukum.....	48
BAB IV : ANALISIS KASUS	
A. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 53/Pid.B/2019/PN.Bdg	66
B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 53/Pid.B/2019/PN.Bdg	71

BAB V : KESIMPULAN

Kesimpulan76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP